STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI LARANGAN EKSPOR KELAPA SAWIT RED II OLEH UNI EROPA TAHUN 2018

Oleh: Yolla Ersafitri

Email: yollaersafitri@gmail.com

Pembimbing: Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes Indonesia's strategy in dealing with the ban on palm oil exports by the European Union. The impact of the dispute makes Indonesian oil palm farmers lose money and affects the national economy which can be said to depend on this commodity. Indonesia then fought for rights in the palm oil trade in the international sphere with the help of the WTO as a mediator.

This study uses a qualitative method using existing reading materials as a source of exposure about Indonesian palm oil exports and European Union policies, with data collection techniques through literature studies and document analysis from several books, journals and websites. This study uses the perspective of Liberalism and Policy Theory.

This research shows that Indonesia has implemented various measures to increase its palm oil production and exports in the face of European Union policies. Such as holding the 6th Ministerial Meeting CPOPC strongly protested the Renewable Energy Directive II (RED II) Policy and the Delegated Act. Indonesia also carries out promotional activities regarding palm oil and the use of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certificates. Indonesia made a Statement with numbers G/TBT/W/565 to the WTO Technical Barriers to Trade Committee which aims to ask for clarification on several matters concerning the EU's RED II. The WTO processed this case by offering a dispute resolution resolution that reduced the obstacles encountered in the palm oil trade. This means that Indonesia won the lawsuit and inevitably the European Union must obey it so that their image in the international community does not become bad.

Keywords: Strategy, RED II, Palm Oil, WTO, European Union

PENDAHULUAN

Setiap negara mengakomodasi kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor impor barang dengan menerbitkan beberapa kebijakan nasional yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kegiatan perdagangan internasional. Diantara kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan minyak sawit mentah. Uni Eropa merupakan salah satu negara yang mengimpor minyak sawit mentah dari Indonesia. Namun, ekspor dan impor saat ini menghadapi hambatan karena adanya kebijakan dari Uni Eropa untuk menghentikan impor sawit tersebut secara bertahap mengingat tudingan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sektor sawit Indonesia seperti penggundulan hutan, perubahan lingkungan, dan dampak negatif lainnya seperti kebakaran hutan atau lahan.¹

Larangan dari Uni Eropa tersebut dikeluarkan melalui kebijakan RED (Renewable Energy Directive) dengan narasi utama kerusakan lingkungan. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Delegated Regulation Supplementing Directive of the Arahan Energi Terbarukan UE II. Rancangan tersebut menyatakan bahwa CPO adalah komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa juga mengeluarkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests on 4 April 2017, dimana dampak dari kebijakan ini direncanakan akan mengubah estimasi proyek impor CPO minyak ke Uni Eropa.

Alasan utama Uni Eropa membuat kebijakan tersebut adalah masalah lingkungan dan kesehatan. Minyak sawit olahan dianggap memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi dan diproses

melalui pengolahan yang buruk yang mengakibatkan pemanasan global dan deforestasi. Oleh karena itu, berdasarkan standar ETS Uni Eropa, produk minyak sawit yang dimiliki Indonesia tidak memenuhi standar karena dianggap menghasilkan karbon diatas batas normal.²

Pada 9 Desember 2019, delegasi Indonesia juga telah mengajukan negoisasi ke delegai Uni Eropa melalu Badan penyelesaian sengketa yaitu WTO mengenai tudingan Uni Eropa yang menganggap kelapa sawit Indonesia menyebabkan deforestasi, perubahan fungsi lingkungan, dan dampak negatif lainnya terhadap bidang lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan.

Penerbitan RED II oleh Uni Eropa memicu resistensi dan kontra-argumen dari pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah alat politik untuk melindungi komoditas lokal dan petani rapeseed dan minyak bunga matahari, seperti dikonfirmasi oleh pernyataan duta besar Uni Eropa. Sejumlah tanggapan keras telah diambil Indonesia karena menganggap bahwa Kebijakan Uni Eropa telah membebani dan harus diperhitungkan. Uni Eropa telah melakukan berbagai kampanye hitam dan ini telah menghambat pasar produk minyak sawit. Sebagai tanggapan, Indonesia membawa konflik ini ke pengadilan dan membuatnya penanggulangan terhadap Uni Eropa.

Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada pengusaha sawit Indonesia, karena ada juga 17 juta penduduk Indonesia yang hidupnya bergantung pada kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung mengingat perkebunan kelapa sawit Indonesia 42% dimiliki oleh petani kecil. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia rakyat.

Berkurangnya permintaan minyak mentah dari Indonesia ke Uni Eropa juga

¹ Atik Krustiyati et al., "Observing European Union Rejection of Indonesia's Crude Palm Oil Exports from the Most Favored Nation and Quantitative Restriction Principles," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 3 (2020): 905–12, [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).25](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).25).

² Mansur Juned, "Ban of Indonesia 's Palm Oil Products to the European Union and Indonesia ' s," no. July (2022).

memicu indikasi dari Indonesia pemerintah kampanye hitam yang sengaja menghubungkan minyak kelapa sawit dengan kesehatan dan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, Indonesia tetap harus mencari jalan keluar agar ekspor kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang meskipun dilanda sengketa dagang dengan Uni Eropa.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori adalah pengidentifikasian teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menggambarkan kerangka acuan atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah.

Prespektif Neorealisme

Penelitian ini menggunakan teori neorealisme. neorealism memiliki dasar yang sama bahwa struktur internasional pada dasarnya adalah anarki, tanpa kekuatan supranasional yang jelas yang mengaturnya.

Pemikiran neorealisme inilah yang menjadi dasar pemikiran tentang situasi dunia saat ini, yaitu sebuah kondisi dilema keamanan, juga dikenal sebagai "dilema keamanan", yang berasal dari pemikiran orang-orang yang pragmatis. Dunia di mana suatu negara tidak pernah dapat yakin terhadap kehendak negara lain di masa depan, yang mengakibatkan negara-negara selalu waspada terhadap ancaman yang mungkin mengancam kelangsungan hidup mereka.

Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, atau modal lintas batas negara. Biasanya kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan ekspor yaitu menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri, impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri.

Teori keunggulan komparatif (*theory of comparative advantage*)

merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi ketika ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa jika suatu negara memiliki kemampuan untuk memproduksi jumlah barang dan jasa yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain, maka negara tersebut akan memiliki keunggulan komparatif. Dalam teori keunggulan komparatif, spesialisasi dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan suatu bangsa.

Salah satu aspek yang cukup kompleks dari interaksi global adalah aktivitas perdagangan internasional. Setiap negara yang terlibat mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, dan bahkan keamanan. Ketika hubungan antarnegara menjadi lebih kuat, beberapa negara akan kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar internasional. Ini akan berdampak negatif pada industri dalam negeri mereka.³

Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Larangan Impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang impor barang tertentu untuk berbagai alasan, seperti barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat atau untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat.
2. Larangan Ekspor adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang melarang impor secara keseluruhan barang tertentu yang masih sangat terbatas di produksi dalam negeri.

³ M. Si Dr. H. Abdul Wahab, SE., *EKONOMI INTERNASIONAL*, n.d.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan bacaan yang sudah ada sebagai sumber pemaparan tentang aktivitas ekspor minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia dan kebijakan Uni Eropa yang melarang ekspor kelapa sawit dari Indonesia, serta strategi Indonesia dalam menghadapinya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data akan menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara, studi kasus pustaka (library research) dan studi dokumentasi.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder dan data primer. Yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁴ Yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Pada tahun 2019, diplomasi ekonomi diprioritaskan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan posisi yang kuat dalam hubungan bilateral dan regional. Pemerintah akan fokus pada jalur perdagangan non-tradisional, menghindari perjanjian perdagangan tradisional Indonesia dan mencermati potensi jalur perdagangan ke depan. Diplomasi ekonomi dipandang sebagai pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, dengan

fokus pada stabilitas nasional dan stabilitas di dalam negeri.

Dalam konteks industri kelapa sawit Indonesia menghadapi ancaman pembatasan ekspor oleh Uni Eropa, jelas bahwa stabilitas industri komoditas ini melingkupi pertimbangan-pertimbangan strategisnya komoditas ini seperti yang telah dipaparkan di awal. Diplomasi ekonomi sebagai proses untuk merumuskan dan merundingkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi di negara lain. Dengan kata lain bahwa diplomasi ekonomi merupakan elemen penting bagi suatu negara dalam mengelola hubungan ekonominya dengan dunia luar.⁶

Diplomasi ekonomi juga berarti strategi untuk melakukan pendekatan-pendekatan non-ekonomi untuk mengatasi masalah ketika dalam kondisi dalam tekanan oleh pihak lain mengingat pada intinya, masalah ekonomi internasional sangat bergantung pula pada aspek-aspek lain yang mempengaruhi, seperti aspek politik.

Dalam meresponse tekanan dari Uni Eropa, Indonesia dapat melakukan tiga strategi diplomasi ekonomi. Strategi pertama yang dapat diambil adalah menolak deforestasi sebagai penyebab utama perubahan iklim. Justru sector energy merupakan kontributor terbesar dengan lebih dari 37% dibanding perubahan tata guna lahan dan pertanian yang hanya berkontribusi sekitar 10%.⁷ Sehingga penting bagi Uni Eropa untuk melihat secara komprehensif driving factor dari perubahan iklim secara global.

Strategi kedua, Indonesia dapat menggandeng organisasi – organisasi

⁴ P Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)," Bandung: CV Alfabeta, 2019, 1–334. Ibid

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf).

⁶ Lovita Latifah Monoarfa, Fitra Hasnu, and Chairul Bongso, "Perlindungan Industri Kelapa Sawit Bagi Kepentingan Nasional Indonesia," n.d.

⁷ Yosepha Pusparisa, "Sektor Energi Jadi Penyumbang Terbesar Emisi Gasrumah Kaca," databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/sektor-energi-jadi-penyumbang-terbesar-emisi-gas-rumah-kaca>.

multilateral yang memiliki standing position sama dengan Indonesia dalam melihat dampak dari hambatan perdagangan kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Sebagai jenis minyak nabati yang memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dibanding jenis tanaman lain seperti kedele, bunga matahari, minyak kelapa, jagung maupun kacang tanah, kelapa sawit menjelma menjadi komoditas utama yang dibutuhkan berbagai sektor produksi secara global. Dalam hal ini Indonesia dapat menggandeng FAO, Organisasi Pangan Dunia di bawah PBB.

Kelapa sawit adalah industri minyak nabati yang paling produktif dari segi hasil panen per hektar, penggunaan lahan, dan masa produktif yang lebih lama, FAO mengakui bahwa kelapa sawit adalah komoditas agrikultur yang sangat penting bagi negara-negara produsen kelapa sawit. Pemerintah Indonesia dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) setuju dengan FAO bahwa industri minyak nabati memainkan peran penting dalam pemenuhan SDGs di negara produsen. Namun, negara-negara importir telah memberlakukan batasan perdagangan non-tarif, yang menghambat upaya pencapaian SDGs untuk meningkatkan hasil lahan.

Selain FAO, ada juga IFAD, yang bersedia memberikan dukungan dan rekomendasi teknis terkait pemenuhan SDG melalui industri minyak nabati. Kajian yang telah dilakukan, seperti studi mengenai industri minyak kelapa sawit di Indonesia, yang juga melihat petani sawit skala kecil, memungkinkan IFAD untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan masukan independen. Hal itu yang kemudian menjadi fokus Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mempromosikan minyak sawit sebagai komoditas berkelanjutan. Jika SDGs tercapai, maka upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal dan menghilangkan kesenjangan sosial antar masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan

bersama.⁸

Sedangkan strategi ketiga adalah pentingnya Indonesia untuk menunjukkan perbaikan tata kelola kelapa sawit di dalam negeri kepada dunia. Terdapat sejumlah instrument kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menepis tuduhan mengenai deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Indonesia telah menegaskan komitmen untuk menghentikan laju deforestasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Untuk menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, program replanting dapat menjadi solusi. Program replanting ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sambil mempertahankan lahan yang sudah ada tetapi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Salah satu tujuan pengelolaan sawit adalah untuk mencapai net zero fire atau lahan bebas dari kebakaran. dengan memaksimalkan penggunaan komunikasi dan teknologi untuk mencegah kebakaran. Keterampilan pencegahan kebakaran dan program pembukaan lahan tanpa bakar diajarkan secara teratur kepada masyarakat.

Untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan climate change, maka pemerintah Indonesia melalui BDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit didasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan

⁸ I. L. Tisnadibrata, "Palm Oil Diplomacy," Bangkok Post, 2019, <https://www.bangkokpost.com/world/1822134/palm-oil-diplomacy>.

kelapa sawit.⁹

Dampak Kebijakan Uni Eropa

Kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, dan masalah ketenagakerjaan pasti akan terpengaruh oleh kebijakan RED II yang membatasi ekspor produk sawit. Besar jumlah industri kelapa sawit Indonesia telah menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga industri ini telah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Secara keseluruhan, ada 4,2 juta orang Indonesia yang bergantung pada pekerjaan langsung di sektor kelapa sawit untuk hidup mereka.

Berdasarkan data impor UE selama lima tahun terakhir, penerapan RED II akan menyebabkan overproduksi minyak sawit di pasar global, mencapai 10,05 persen dari total yang diperdagangkan saat ini. Ini berarti Indonesia akan kehilangan pasarnya di sana karena penerapan diskriminatif minyak sawit UE. Ini menghasilkan 4,55 juta ton per tahun. Adanya kelebihan pasokan sawit tentunya akan meningkatkan tekanan pada harga minyak kelapa sawit, yang telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan harga ini diperkirakan akan lebih buruk lagi di masa mendatang.

Diperkirakan kontribusi ekspor dan penerimaan devisa negara akan berkurang sebesar USD 104,55 juta per tahun, bersama dengan pengurangan kontribusi sawit terhadap PDB Indonesia sebesar Rp 1,63 Triliun per tahun, sehingga pendapatan nasional negara akan berkurang sebesar Rp 218,18 miliar per tahun. kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia, yang sebagian besar ditopang oleh perdagangan sawit.

Negara-negara anggota UE pasti akan mengikuti kebijakan EU. Jika ini terjadi, Indonesia akan kehilangan konsumen untuk ekspor minyak sawit di beberapa mitra dagangnya di wilayah

tersebut. Dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada tingkat permintaan pasar untuk produksi sawit domestik.

Industri minyak sawit telah membantu mengurangi pengangguran di Indonesia dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar industri. Akibatnya, sawit telah memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di berbagai wilayah. Khawatir bahwa jika Indonesia kehilangan pasar di Eropa, permintaan sawit akan menurun, yang akan mengakibatkan penurunan nilai jual. Mereka khawatir bahwa perusahaan akan memutuskan kontrak dengan karyawannya dan bahkan petani kecil akan merasakan dampaknya. Akibatnya, pengangguran mungkin meningkat karena industri sawit menjaga hidup empat juta orang Indonesia.¹⁰

Strategi Indonesia terhadap Kebijakan Uni Eropa RED II

1. Pertemuan Resmi (Multilateral)

Pemerintah Indonesia hadir di pertemuan internasional di Brussels, Belgia, dari tanggal 8 hingga 9 April 2019. Pertemuan ini adalah bagian dari misi gabungan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Perjanjian Delegated Act dan Directive II on Renewable Energy (RED II) adalah alasan pertemuan ini.

Sebelum pertemuan resmi di Brussels, negara-negara anggota CPOPC telah mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019. Saat itu, anggota CPOPC menentang Resolusi Petunjuk Tambahan

⁹ Monoarfa, Hasnu, and Bongso, "Perlindungan Industri Kelapa Sawit Bagi Kepentingan Nasional Indonesia."

¹⁰ Hendra Maujana Saragih and Hanna Rahayu, "Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022): 296, <https://doi.org/10.29210/020221377>.

2018/18/2001 UE mengenai Energi Terbarukan, yang disajikan dalam Delegated Act dan Directive II for Renewable Energy (RED II).

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC, kesepakatan bersama telah dicapai mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Ini dianggap sebagai upaya politik oleh Uni Eropa untuk mengisolasi minyak nabati dari kelapa sawit di pasar nabati Eropa, menguntungkan minyak nabati lokal di kawasan Eropa, seperti minyak sunflower dan rapeseed, yang dianggap kurang menguntungkan.

Negara-negara yang tergabung dalam CPOPC akan melakukan negosiasi dan konsultasi perdagangan dengan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa, serta dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan industri sawit di Benua Biru selama pertemuan resmi di Brussels.

Selama proses negosiasi, CPOPC menyampaikan perspektif kebijakan negara-negara (RED II), yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk membatasi dan secara tidak langsung menghambat ekspor-impor minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Selain itu, CPOPC menyatakan bahwa larangan tersebut hanya didasarkan pada penelitian ilmiah yang tidak memadai dengan menggunakan Indirect Land Use Change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.¹¹

CPOPC menyatakan bahwa kriteria dalam Delegated Act dari kebijakan RED II hanya digunakan untuk melarang ekspor dan impor minyak sawit ke pasar energi terbarukan Eropa dalam upaya mempromosikan minyak nabati yang ditanam dan dikembangkan di wilayah Uni Eropa. CPOPC juga menyatakan bahwa kriteria yang digunakan terhadap tanaman kelapa sawit tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bertentangan dengan fakta.

Ini pasti bertentangan dengan konstitusi UE dan Konvensi Internasional di Bidang Ekonomi dan Hak Sosial. Dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap RED II melalui otoritas UE, Indonesia dan negara anggota CPOPC memiliki harapan bahwa pihak UE dapat mengubah kebijakan tersebut dengan cara yang akan menguntungkan semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholder sebagai pengguna minyak sawit di kawasan Eropa.

Pertemuan resmi tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan produktivitas minyak kelapa sawit bagi pemerintah Indonesia sendiri. Jika masalah ini tidak diselesaikan sampai kebijakan RED II disahkan dan diterapkan pada tahun 2024, hal itu pasti akan berdampak besar pada ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Ini karena Uni Eropa adalah pasar utama untuk ekspor minyak sawit Indonesia. Dengan demikian, Indonesia, bersama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam CPOPC, akan terus melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa.

Pandangan khusus pemerintah Indonesia, yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, disampaikan dalam pertemuan tersebut. Dilaporkan bahwa jika Uni Eropa akhirnya menerapkan kebijakan dengan kriteria yang sama seperti sebelumnya, kelapa sawit akan dianggap sebagai tanaman berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa kebijakan RED II akan berdampak signifikan. Oleh karena itu, mereka akan merevisi semua kerja sama bilateral dengan Uni Eropa dan Indonesia, serta memulai proses hukum melalui forum WTO.

2. Meningkatkan Promosi untuk meningkatkan Citra Negara

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, gencar mempromosikan kelapa sawit dan penggunaan sertifikat kelapa sawit yang

¹¹ Pepsi, "2019 Sustainability Report, Boral," no. June 2020 (2019): 32-42, <https://www.boral.com/community-sustainability/sustainability-report>.

berkelanjutan Indonesia (ISPO). Ini menunjukkan pencitraan Indonesia atas kampanye hitam yang terus diawasi oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Minyak sawit, khususnya minyak sawit Indonesia, adalah satu-satunya komoditas pertanian di dunia saat ini yang memiliki sistem manajemen dan sertifikasi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada tahun 2011, mengingat bahwa kelapa sawit adalah komoditas penting dan andalan pertanian Indonesia dan memainkan peran penting dalam perekonomian negara, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan (Sustainable) yang telah disesuaikan dengan berbagai perundang-undangan yang berlaku.¹²

Dengan dibentuknya sertifikasi ISPO, diharapkan semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Ini pasti akan meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global dan menciptakan citra yang baik tentang proses produksinya.

Pasar global telah mengeluarkan peraturan tentang produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan ISPO melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Tujuan dari Roundtable adalah untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. RSPO dan ISPO milik Indonesia berbeda dalam cara mereka diatur. RSPO adalah sukarela,

atau sukarela, sedangkan ISPO adalah kewajiban.

Dalam kaitannya dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maksudnya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, keselamatan, kemampuan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi ke depannya. Akibatnya, industri kelapa sawit Indonesia diharapkan memiliki sertifikasi ISPO.

Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebuah industri harus dapat memenuhi tujuh prinsip yang ditetapkan. Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan dianggap tidak lolos dan tidak akan mendapatkan sertifikasi. Persyaratan ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan menyebabkan sanksi.

Ketujuh prinsip ISPO adalah sebagai berikut: (1) proses pengolahan kelapa sawit yang benar; (2) harus ada sistem perizinan dan manajemen perkebunan yang jelas; (3) harus ada kegiatan pemantauan lingkungan selama pengembangan dan produksi minyak kelapa sawit; (4) industri perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya; (5) harus memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan masyarakat; dan (6) harus ada peluang bisnis yang menguntungkan, (7) pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.¹³

Sertifikasi ISPO menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Meskipun beberapa perkebunan kelapa sawit masih belum mendapatkan Sertifikasi ISPO, perusahaan-perusahaan termasuk petani

¹² Ninla Elmawati Falabiba et al., "Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia (Studi Pada PT REA KALTIM PLANTATION - Jakarta)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

¹³ Diplomasi Indonesia et al., "Kata Kunci," no. Red Ii (2020).

yang saat ini mendapatkan Sertifikasi ISPO menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola berkelanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berjalan dengan baik.

3. Gugatan ke WTO (World Trade Organization)

Sebagai Anggota WTO, Indonesia berhak untuk dilindungi jika negara anggota WTO lainnya melanggar perjanjian WTO dan berdampak negatif pada Indonesia. Menanggapi kebijakan RED II UE, Indonesia membuat Pernyataan dengan nomor G/TBT/W/565 kepada Komite Technical Barriers to Trade WTO pada tanggal 22 November 2018 yang tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi mengenai beberapa hal tentang RED II UE.

Indonesia berkonsultasi dengan Komite TBT mengenai masalah ini karena keberatan mereka terfokus pada kriteria ILUC yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Keberatan yang dikonsultasikan dengan Komite TBT disebut sebagai masalah perdagangan khusus (STC) karena sifatnya yang khusus, yaitu hanya berfokus pada persyaratan teknis.

Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 13.1 Perjanjian TBT, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Komite TBT adalah membantu negara-negara anggota WTO melakukan konsultasi tentang pelaksanaan Perjanjian TBT.

Jika konsultasi dengan Komite TBT tidak menyelesaikan masalah, Indonesia dapat membawa keberatannya sebagai sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Semua ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa WTO diatur dalam The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Sebagaimana diatur juga dalam DSU, mekanisme penyelesaian sengketa

WTO memiliki tiga tahap, yaitu konsultasi, pembentukan panel, dan pembentukan Appellate Body.

Selama proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dengan sukarela mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya melalui proses seperti konsiliasi, mediasi, dan itikad baik (Pasal 5 DSU). Upaya itikad baik, konsiliasi, dan mediasi dapat dimintakan untuk dilakukan dan diakhiri oleh para pihak kapan pun (Pasal 5 paragraf 3 DSU).¹⁴

Menurut pasal 22, paragraf 2, DSU, Uni Eropa harus bernegosiasi dengan pihak-pihak atau negara-negara anggota yang mengajukan permohonan DSB, yaitu Indonesia, untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang diterima di antara para pihak yang bersengketa dalam kasus di mana Uni Eropa tidak dapat melaksanakan rekomendasi panel atau Lembaga Banding sampai pada waktu yang ditetapkan. Jika tidak ada kesepakatan kompensasi dalam 20 hari, Indonesia dapat meminta DSB untuk menghentikan konsesi atau kewajiban lain. Ini disebut retaliasi atau retaliasi silang, dan berdasarkan perjanjian tertutup terhadap Uni Eropa. Retaliasi adalah penangguhan kewajiban terhadap barang atau jasa yang disengketakan. Sebaliknya, retaliasi silang adalah penangguhan kewajiban terhadap barang atau jasa yang tidak terlibat sengketa.

¹⁴ Steve Andrianto, "Sengketa Uni Eropa Dan Republik Indonesia: Pasal 26 Renewable Energy Directive II Dan World Trade Organization," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 1 (2020): 59–80, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2181>.

SIMPULAN

Penyebab konflik internasional antara Uni Eropa dan Indonesia dalam industri kelapa sawit adalah pengeluaran kebijakan RED II oleh Uni Eropa. Kebijakan ini menyebabkan tarif anti-dumping untuk kelapa sawit Indonesia dan aturan yang lebih ketat untuk komoditas tersebut. Salah satu hal yang sangat penting adalah bahwa hasil kelapa sawit Indonesia harus mengutamakan pelestarian lingkungan dan flora yang ada di dalamnya, serta menjamin pekerja industri kelapa sawit tetap sehat.

Sebagai tanggapan, Indonesia membuat kebijakan ISPO untuk memungkinkan Uni Eropa menerima kembali kelapa sawit Indonesia. Namun, semua upaya Indonesia gagal membuat Uni Eropa puas. Uni Eropa mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan eksploitasi lingkungan besar-besaran karena membuka lahan untuk penanaman kelapa sawit. Mereka juga mengatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia tidak memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya. Indonesia mengalami kerugian yang signifikan dan mengklaim bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan asumsi yang diragukan kebenarannya, sehingga membawa kasus ini ke WTO untuk diselidiki.

WTO menangani masalah ini dengan menawarkan penyelesaian sengketa yang mengurangi tantangan dalam perdagangan kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menang dalam gugatan tersebut, dan Uni Eropa harus mematuhi agar reputasi mereka di dunia internasional tetap baik.

Untuk melindungi kepentingan nasional yang terancam oleh resolusi tersebut, Uni Eropa mengambil tindakan untuk merevisi kebijakannya terkait energi terbarukan, yang berdampak pada kelapa sawit dan produk turunannya di Indonesia. Sebaliknya, karena Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kebijakan UE dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Sampai saat ini,

kasus masih berlanjut. Kami masih menunggu tindakan terbaik untuk melindungi kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. H. Abdul Wahab, SE., M. Si. *EKONOMI INTERNASIONAL*, n.d.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR-METODOLOGI-PENELITIAN.pdf>.

Artikel, Jurnal

Andrianto, Steve. "Sengketa Uni Eropa Dan Republik Indonesia: Pasal 26 Renewable Energy Directive II Dan World Trade Organization." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5, no. 1 (2020): 59–80. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2181>.

Indonesia, Diplomasi, Dalam Menolak, Penerapan Kebijakan, Uni Eropa, Syamsul Ramdhana, Program Studi, Ilmu Hubungan, et al. "Kata Kunci:," no. Red Ii (2020).

Juned, Mansur. "Ban of Indonesia ' s Palm Oil Products to the European Union and Indonesia ' s," no. July (2022).

Krustiyati, Atik, Sylvia Janisriwati, Novela Christine, and Mokhammad Khoirul Huda. "Observing European Union Rejection of Indonesia's Crude Palm Oil Exports from the Most Favored Nation and Quantitative Restriction Principles." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 3 (2020): 905–12. [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).25](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).25).

Monoarfa, Lovita Latifah, Fitra Hasnu, and Chairul Bongso. "Perlindungan Industri Kelapa Sawit Bagi Kepentingan Nasional Indonesia," n.d.

- Ninla Elmawati Falabiba, Wisnu Anggaran, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, B.B Wiyono, Ninla Elmawati Falabiba, Yong Jun Zhang, Yong Li, and Xu Chen. "Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia (Studi Pada PT REA KALTIM PLANTATION - Jakarta)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.
- Pepsi. "2019 Sustainability Report, Boral," no. June 2020 (2019): 32–42. <https://www.boral.com/community-sustainability/sustainability-report>.
- Saragih, Hendra Maujana, and Hanna Rahayu. "Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 2 (2022): 296. <https://doi.org/10.29210/020221377>.
- Sugiyono, P Dr. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)." *Bandung: CV Alfabeta*, 2019, 1–334.

Website

- Pusparisa, Yosepha. "Sektor Energi Jadi Penyumbang Terbesar Emisi Gasrumah Kaca." *databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/sektor-energi-jadi-penyumbang-terbesar-emisi-gas-rumah-kaca>.
- Tisnadibrata, I. L. "Palm Oil Diplomacy." *Bangkok Post*, 2019. <https://www.bangkokpost.com/world/1822134/palm-oil-diplomacy>.